



PEMERINTAH DAERAH
LAMPUNG TENGAH



RENJA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BAPENDA

BADAN PENDAPATAN DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Rancangan Rencana Perubahan pembangunan Tahunan Daerah Badan Pendapatan Daerah dibuat untuk periode satu tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah dimana dalam RENJA SKPD tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Dalam pelaksanaan RENJA SKPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal, pemerintah bertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Dalam Renja Perubahan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tergambarkan Rencana Kerja dan Capaian kinerja untuk Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam tahun 2024, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan media untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Gunung Sugih, 02 Agustus 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Drs. ASRUL SANI

NIP. 19660621 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pengertian Renja Perubahan SKPD.....	2
1.3. Proses Penyusunan Renja Perubahan SKPD.....	2
1.4. Keterkaitan antara Renja Perubahan SKPD dengan dokumen RKPD.....	2
1.5. Landasan Hukum	4
1.6. Maksud dan Tujuan	5
1.7. Sistematika Penulisan	6
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu Capaian Renstra SKPD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	17
2.4. Reviuw terhadap Rancangan awal RKPD.....	18
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	25
3.1. Telaah terhadap kebijakan basional	25
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	26.
3.3. Program dan Kegiatan	27
BAIV Rancanga kerja dan pendanaan perangkat daerah	34
BAB V Penutup	35

Halaman Tabel :

Tabel TC 29	10
Tabel TC 30	16
Tabel TC 31	19
Tabel TC 32	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka terdapat Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Dalam rangka mensukseskan Kebijakan Nasional tentang pelaksanaan otonomi Daerah dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program –program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah , Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah berupaya semaksimal mungkin memberikan kontribusi yang nyata melalui penyusunan dan pelaksanaan program – program kerja yang dapat dilaksanakan , tepat guna dan tepat sasaran.

Sebagai salah satu acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan program-program kerja efektif dan efisien serta transparan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan (RenjaP) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari rancangan awal rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021- 2026.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh Karena itu, Penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel bersamaan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistensi SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD,

Dalam rangka implementasi peraturan perundangan tersebut sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Sasaran Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.2. Pengertian RenjaPSKPD

Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Perubahan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

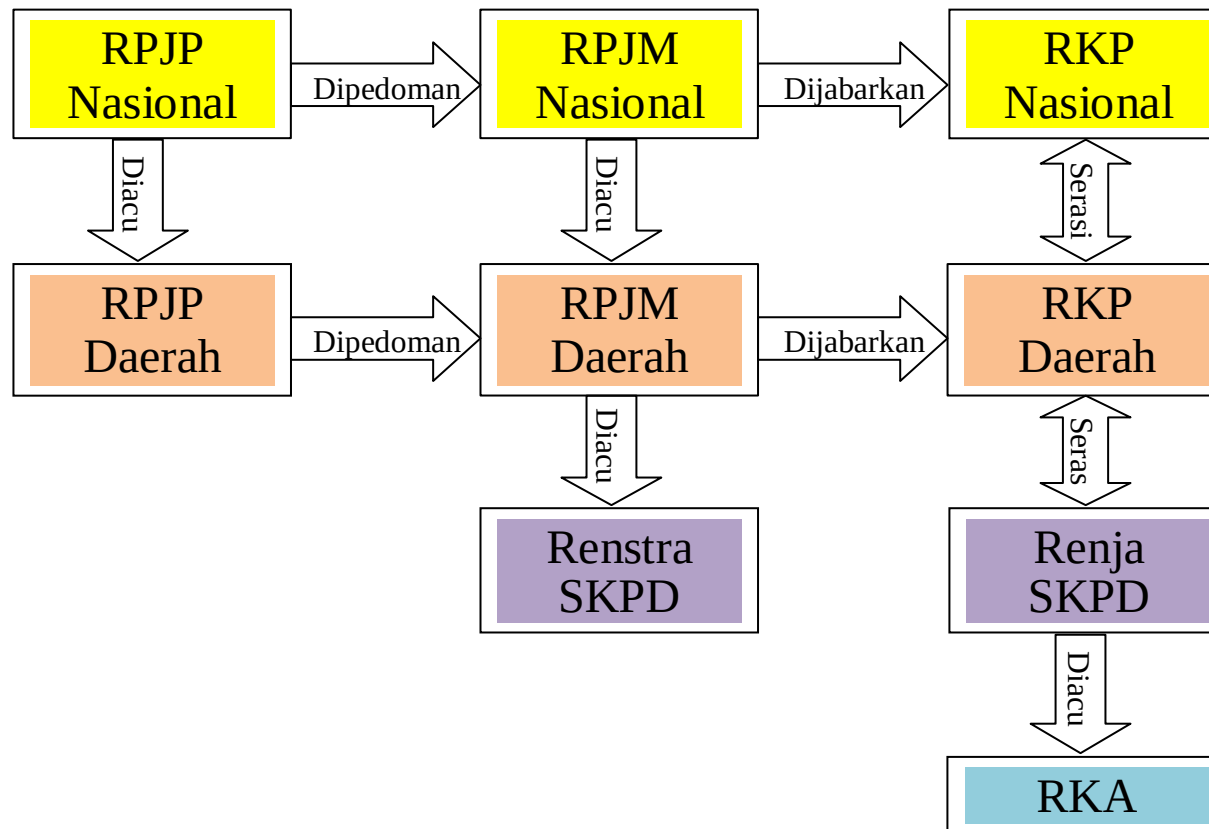
1.3. Proses Penyusunan Renja SKPD

Dalam prosesnya, penyusunan renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPd, oleh karena itu penyusunan rancangan renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPd, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra SKPD. Penyusunan renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- 1.3.1. Tahap perumusan rancangan renja SKPD ; dan
- 1.3.2. Tahap penyajian rancangan renja SKPD

1.4. Keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPd

Keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan Dokumen RKPd dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



1.5.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan BAPENDA Lampung Tengah Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
7. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
13. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten lampung tengah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender.
15. Peraturan Bupati lampung tengah nomor 7 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 1 tahun 2019 tentang kabupaten layak anak.

1.6. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kerja Perubahan (RENJAP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kerja agar tetap berada pada koridor perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dengan prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja Perubahan yang efektif dan efisien .

Penyusunan Renja Perubahan ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

1. Rencana Kerja Perubahan (RENJA) merupakan sarana bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membuat suatu Program/Kegiatan.
2. Rencana Kerja Perubahan (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
3. Rencana Kerja Perubahan (RENJA) merupakan Pedoman Penyusunan RKA Perubahan perangkat daerah

Dua Tujuan utama RENJA Perubahan tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja Perubahan SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD

1.4. Sistematika

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun- tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antararancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dan rancangan awalan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

III.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

III.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain daripada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada daerah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan dilakukan.

Secara umum Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun program dan kegiatannya yang ada sekarang dan ditahun lalu disesuaikan dengan bidang urusan yang menyangkut urusan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah)

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra 2024 dapat di lihat pada tabel T.C 29

T.C 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2023
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 -2025 (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2021 s/d 2025		Capaian
									Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4)	12
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
5	02				Keuangan										
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	100%	100	100	100	
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100%	100	100	100	
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100	100	100	100	100%	100	100	100	
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	100	100	100	100	100%	100	100	100	

5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	100	100	100	100	100	100	100	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	3
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	2
5	02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	68	66	66	100%	68	202	2.9
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100%	1	3	1
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	3	3	100%	3	9	3
5	02				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	100	100	100	100	100	100	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	18	18	100%	-	18	18

5	02				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase jenis kecukupan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	13	7	7	100%	13	33	2.7
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	2	13	13	100%	2	17	17
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	36	20	20	100%	36	92	3.2
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21	18	20	20	100%	18	56	2.6
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98	72	80	80	100%	72	224	2.4
5	02				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	-	7	7	0	-	7	7
5	02				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	4	4	4	4	100%	4	12	3

						Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
5	02					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jenis sarana dan prasarana aparatur yang optimal	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	23	23	23	100%	23	69	3
5	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	82	9	9	100%	82	173	1.9
5	02	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	2	100%	2	6	3
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
							Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
							Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	04	2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	04	2.01	01		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	2	2	2	100%	2	6	0.6

5	02	04	201	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	12	6	6	100%	12	30	3	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23	36	22	22	100%	36	94	4	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	114	114	29%	-	114	114	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	3	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan ,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	12	12	12	100%	12	36	2	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7.400	9.105	128.567	128.567	91%	9.105	146.777	19.8	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	651.050	64.889	640.686	640.686	96%	64.889	770.464	1.18	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12.850	11.410	12.523	12.523	76%	11.410	35.343	2.7	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	12	12	100%	12	36	3	

5	02	04	2.1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8	9	9	9	100%	9	27	3.3	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.280	2.076	3.253	3.253	66%	2.076	7.405	2.2	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	9	9	9	100%	9	27	2.7	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11	13	13	13	100%	13	39	3.5	

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing Bidang. Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel T.C30

TC.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Indikator	SPM/	IKK (2022)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		13	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	



II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Badan Pendapatan daerah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Badan pendapatan Daerah kabapten Lampung Tengah mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola pendapatan daerah berbagai permasalahan dihadapi berikut daftar permasalahan yang dihadapi di seluruh bidang SKPD Bapenda:

1. Kurang optimal pelayanan kepada wajib pajak
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi
3. Belum optimalnya sinergitas antara instansi pengelolaan petugas pemungut pajak daerah & retribusi daerah.
4. Cakupan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Terlalu Luas.
5. Kurang Sumber Daya Manusia

Disamping permasalahan di atas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah juga menghadapi tantangan dan peluang diantaranya :

1. Tantangan
 1. Mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak
 2. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peluang
 - a. Adanya Sistem Pengelolaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah berbasis IT
 - b. Tingkat pendidikan aparatur pengelola yang tinggi
 - c. Kuantitas aparatur pengelola pendapatan daerah

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program /kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C31

TC.31
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Rencana Kerja Perubahan RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan 2025					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapenda	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	51.251.933.397	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapenda	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	50.152.195.238	
			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100		
			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100		
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	100				Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	100		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	100	66.964.300	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	100	68.164.300	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	48.396.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	48.396.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	18.568.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	19.768.300	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu		14.268.502.838	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu		14.895.731.242	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	13.511.242.638	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	13.691.952.542	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	729.472.900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1,170,991,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	27.787.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	32,787,300	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	100		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	50,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	50,000,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase jenis kecukupan administrasi perkantoran		510.259.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Persentase jenis kecukupan administrasi perkantoran		650,281,500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	11.776.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	11,776,400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	64.750.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	299,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	14.474.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	19,897,500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21	98.836.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21	115,025,600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98	320.422.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	204,582,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100	388.531.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100	793,350,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	388.531.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	793,350,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase prasarana kantor		35.493.744.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase prasarana kantor		33.888.562.396	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	35.493.744.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	33.888.562.396	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang optimal		523.932.259	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang optimal		520.120.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	359.360.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	325,690,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	119.280.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	134,580,800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	45.291.459	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	59,850,000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100	2.742.217.900	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100	3,522,663,500	
			Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100				Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100		
			Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	100				Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	100		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100	2.742.217.900	2.522.306.100,00	Bapenda	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100	3,522,663,500	

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	42.354.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	49,894,000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	35.382.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	53,664,000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23	108.585.700	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23	175,522,200	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		318.976.900	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		-	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	358.575.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	322,876,900	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	1.506.636.900	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	480,715,000	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Bapenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7400	83.626.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Bapenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7400	1,763,150,400	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	651050	45.193.500	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	651000	163,546,500	

	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12850	29.127.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12800	86,630,700	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	102.100.600	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	25,513,000	
	Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8	33.370.300	Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8	177,330,600	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3280	42.315.500	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3270	100,186,500	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	35.974.500	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	73,815,500	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11	2.742.217.900	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11	49,818,200	
	Jumlah				53.994.151.297	Jumlah				53.674.858.738	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025 sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri ,maju,adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya asing.

Dengan telah ditetapkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.”**

Berdasarkan lampiran 1 perpres Nomor 18 tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2025. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi,dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis,produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan ditribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-



undang. Pertama, UU cipta lapangan kerja. Kedua, UU pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

III. 2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPENDA

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi kabupaten Lampung Tengah yaitu **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**. Melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.



Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

Tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 adalah meningkatkan penerimaan keuangan daerah.

Sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap :

- a. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah

III. 2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerja sama dengan masyarakat.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam Renja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - j. Penagihan Pajak Daerah
 - k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel T.C 33.

TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN PERUBAHAN 2024 DAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		Bapenda			APBD			
5	02				Keuangan		Bapenda			APBD			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Bapenda	100	51.251.933.397	APBD		100	50.152.195.238
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Bapenda	100				100	
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	Bapenda	100				100	
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Bapenda	100				100	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	Bapenda	100	66.964.300	100		100	68.164.300
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	2	48.396.000	2		2	48.396.000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	2	18.568.300	2		2	19.768.300

5	02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	Bapenda		14.268.502.838				14.895.731.242
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	68	13.511.242.638	68		68	13.691.952.542
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	1	729.472.900	1		1	1,170,991,400
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda	3	27.787.300	3		3	32,787,300
5	02				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Bapenda	100		100		100	50,000,000
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bapenda	-		-		-	50,000,000
5	02				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase jenis kecukupan administrasi perkantoran yang tersedia	Bapenda		510.259.000				650,281,500
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	12	11.776.400	12		12	11,776,400
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	5	64.750.000	1		1	299,000,000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	28	14.474.500	28		28	19,897,500
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	21	98.836.100	21		21	115,025,600

5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	98	320.422.000	90	90	204,582,000
5	02				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Bapenda	100	388.531.000	100	100	793,350,000
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bapenda	1	388.531.000	-	-	793,350,000
5	02				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana kantor yang tersedia	Bapenda		35.493.744.000			33.888.562.396
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	4	35.493.744.000	4	4	33.888.562.396
5	02				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jenis sarana dan prasarana aparatur yang optimal	Bapenda		523.932.259			520.120.800
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	23	359.360.000	23	23	325,690,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda	89	119.280.800	89	89	134,580,800
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	2	45.291.459	2	2	59,850,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Bapenda	100	2.742.217.900	100	100	3,522,663,500
						Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100		100	100	
						Persentase kepatuhan wajib pajak daerah		100		100	100	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase Penerimaan Pendapatan Daerah	Bapenda	100	2.742.217.900	100	100	3,522,663,500

5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	10	42.354.000	10		10	49,894,000
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	10	35.382.000	10		10	53,664,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	23	108.585.700	23		23	175,522,200
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda		318.976.900				-
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	2	358.575.000	2		2	322,876,900
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	12	1.506.636.900	12		12	480,715,000
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda	7400	83.626.000	7400		7400	1,763,150,400
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	651050	45.193.500	651000		651000	163,546,500
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	12850	29.127.000	12800		12800	86,630,700
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda	12	102.100.600	12		12	25,513,000
5	02	04	2.1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	8	33.370.300	8		8	177,330,600
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	3280	42.315.500	3270		3270	100,186,500

5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	10	35.974.500	10		10	73,815,500
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	11	42.354.000	11		11	49,818,200
					Jumlah				53.994.151.297				53.674.858.738

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 terdapat 2 (dua) program, 6 (enam) Kegiatan dan 27 (dua puluh delapan) Sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam diloihat dalam tabel berikut:

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		Bapenda			APBD
5	02				Keuangan		Bapenda			APBD
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	Bapenda	100	51.251.933.397	APBD
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Bapenda	100		APBD
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	Bapenda	100		APBD
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Bapenda	100		APBD
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	Bapenda	100	66.964.300	APBD
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	2	48.396.000	APBD
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	2	18.568.300	APBD
5	02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	Bapenda		14.268.502.838	APBD



5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	68	13.511.242.638	APBD
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	1	729.472.900	APBD
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda	3	27.787.300	APBD
5	02				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase jenis kecukupan administrasi perkantoran	Bapenda	100	510.259.000	APBD
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	12	11.776.400	APBD
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	5	64.750.000	APBD
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	28	14.474.500	APBD
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	21	98.836.100	APBD
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	98	320.422.000	APBD
5	02				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana kantor	Bapenda	100	35.493.744.000	APBD
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	4	35.493.744.000	APBD



5	02				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Bapenda	100	388.531.000	100	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bapenda	1	388.531.000	-	
5	02				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jenis sarana dan prasarana aparatur yang optimal	Bapenda	100	523.932.259	APBD	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	23	359.360.000	APBD	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bapenda	89	119.280.800	APBD	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	2	45.291.459	APBD	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Bapenda			APBD	
						Persentase Realisasi Retribusi Daerah				APBD	
						Persentase kepatuhan wajib pajak daerah				APBD	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	Bapenda		2.742.217.900	APBD	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	100	42.354.000	APBD	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	100	35.382.000	APBD	



5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	100	108.585.700	APBD
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	100	318.976.900	APBD
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	10	358.575.000	APBD
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda	10	1.506.636.900	APBD
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	23	83.626.000	APBD
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda		45.193.500	APBD
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda	2	29.127.000	APBD
5	02	04	2.1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12	102.100.600	APBD
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	7400	33.370.300	APBD
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	651050	42.315.500	APBD
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	12850	35.974.500	APBD



BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2025. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini sebagai pedoman/acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat menuju Lampung Tengah dan Terdepat.

Gunung Sugih, 02 Agustus 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Drs. ASRUL SANI
NIP. 19660621 198603 1 002